



RANCANGAN AKHIR

RENJA - PERUBAHAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MAKASSAR

TAHUN 2023



DISPORA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MAKASSAR



BAB I

PENDAHULUAN

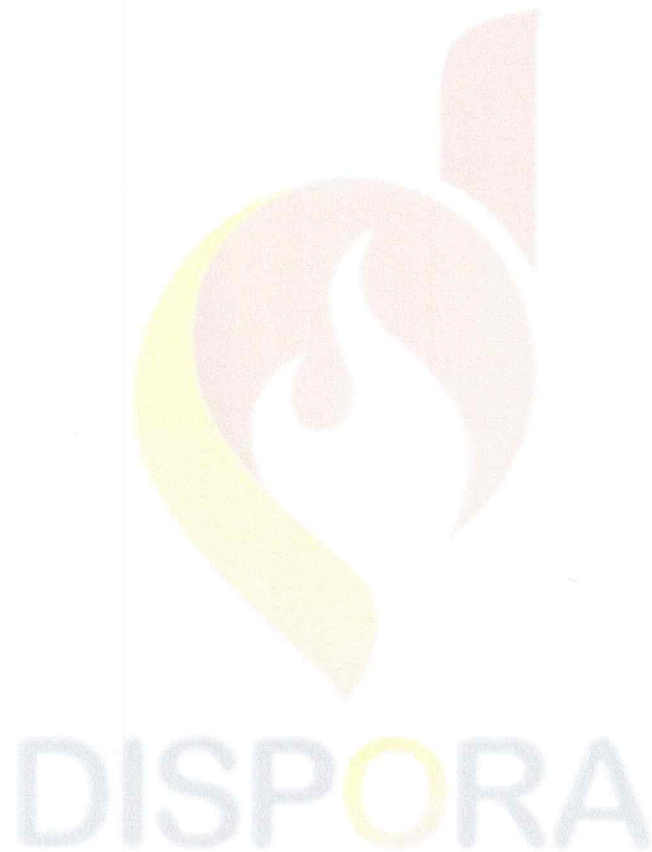
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional;
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 147 Tahun 2007).
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah kota Makassar nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan perubahan Renja –PD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar adalah :

- Mengevaluasi terhadap program dan kegiatan pada triwulan II sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya;
- Mengumpulkan rancangan/usulan program dan kegiatan dari bidang-bidang dalam lingkup kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
- Memilih, memilah dan menelaah rancangan/usulan program dan kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas;
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD perubahan tahun 2023 bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

DISPORA

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Tahun 2023 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 361 ayat (3), sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan SKPD agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, serta Sistematika Penulisan.

- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Hasil Triwulan II dan capaian Renstra SKPD tahun berkenaan.

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2023.

- BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian kesimpulan, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar tahun 2022-2026 disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere Dan Smart City Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan serta upaya dalam pencapaian Misi 2 (kedua) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua”.

Di tahun 2023 Dinas Pemuda dan olahraga Kota Makassar berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah pada poin 2 misi ke 2 yaitu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata serta misi 3 poin 1. Mewujudkan Makassar menjadi “Livable City” dan “Resilient City”. Adapun capaian program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	45%	50%
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	50%	50%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	45%	50%

Capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

- Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam

Kondisi Baik terealisasi sebesar 45 persen;

- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50 persen;
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 45 persen

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 12.285.570.050 dan realisasi sebesar Rp. 3.419.213.211 atau 28%.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

1. Proses pencairan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari belanja gaji, belanja operasional dan belanja modal.
2. Untuk belanja modal yang ada pada program tersebut beberapa jenis belanja modal belum memiliki TKDN.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Indikator	Target	Realisasi s/d tw II 2023	Capaian
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	70%	-	-
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Masyarakat	144 organisasi aktif	98 OKP	68%

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri kami lakukan perubahan jumlah target. Ini dikarenakan pada saat menyusun Renstra belum ada data kepemudaan yang valid untuk dijadikan rujukan target maupun realisasi. Sementara dengan adanya program pencatatan database kepemudaan, kami telah dapat menentukan

jumlah keseluruhan dan jumlah target yang disasar, yang disesuaikan dengan perkiraan alokasi Anggaran untuk program kepemudaan di Dinas Pemuda & Olahraga Kota Makassar.

Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, pada tahun 2022 terdapat ± 300.000 jumlah pemuda di kota makassar dan 19.450 pemuda berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri atau 5%.

- Faktor Pendorog :
- Faktor Penghambat :
- Tindak lanjut :

Program Pengembangan kapasitas kepemudaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 14.699.215.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.314.706.900 atau 16%.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Indikator	Target	Realisasi s/d tw II 2023	Capaian
Cakupan Pembinaan Olahraga	25 cabor binaan	-	-
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	46 Atlet binaan	-	-
Jumlah Atlet Berprestasi	306 atlet berprestasi	-	-
Jumlah Prestasi Olahraga	25 cabang olahraga	-	-



PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar 266.355.834.050 dan realisasi sebesar 24.650.427.298 atau 9%.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pembinaan Pramuka	610 binaan pramuka	-	-
Jumlah Anggota Pramuka Berprestasi	70 orang	-	-

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000.000 atau 100%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional;
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pada tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga merencanakan 4 program terdiri dari 1 program penunjang/pendukung dan 3 program utama. Rencana Kerja Perubahan Dinas pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut :

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan ketersediaan anggaran

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Substansi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga disusun dengan mempedomani Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.3 Rencana Tingkat Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga, maka akan berpengaruh terhadap tingkat capaian dan target yang telah ditetapkan.
2. Bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, agar segera menyusun rencana kerja masing – masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.

3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kami Berharap, bahwa Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran maupun faktor permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA MAKASSAR**



ANDI PATIWARE, S.STP.,M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 198304022001121001



**Format Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktiraja Maju Rencana Tahun 2024			
		Keeluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Target Ukuran	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
			Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah		Sumber Dana			
														Sebelum	Sesudah	Sebelum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDAHAN DAN OLAHRAGA																
PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik															15.851.657,955
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja															179.135.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															125.015.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															2.640.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															2.640.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD															2.640.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan															2.640.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Ikhtisar-Realisasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar-Realisasi Kinerja Perangkat Daerah															33.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keuangan perangkat daerah															10.560.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN															7.266.555,868
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															7.654.825,868
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															15.070.516,736
Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah	Presentase capaian administrasi kepagawainan															30.016.018,472
Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															392.150.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Pelatihan															51.150.000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralihan dan kelengkapan kantor lainnya															341.000.000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.255.900,00	4.255.900,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				4.255.900,00	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.693.490,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11.453.300,00	11.453.300,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				11.453.300,00	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	12.609.630,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42.250.000,00	42.250.000,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				42.250.000,00	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	46.475.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8.640.000,00	8.640.000,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				8.640.000,00	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9.504.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.000.000,00	424.000.000,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				831.700.000,00	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	914.870.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen yang disiapkan	15.000.000	15.000.000	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				15.000.000	APBD	Jumlah Dokumen yang disiapkan	50 Dokumen	16.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.782.314.270	1.782.314.270	100 %	100 %	10 Jenis	10 Jenis	KOTA MAKASSAR				3.513.314.270	APBD	Persentase tersedianya barang milik kantor	100 %	3.864.645.697
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.782.314.270,00	1.782.314.270,00	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	KOTA MAKASSAR				3.583.066.520,00	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	3.941.373.172,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.771.445.200	2.771.445.200	100 %	100 %	100%	100%	KOTA MAKASSAR				2.451.145.200	APBD	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	2.696.259.720
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.663.600,00	36.663.600,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				36.663.600,00	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.329.960,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	295.162.000,00	295.162.000,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				295.162.000,00	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	324.678.200,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.439.319.600,00	2.439.319.600,00	100 %	100 %	12 blh	12 blh	KOTA MAKASSAR				2.119.319.600,00	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.331.251.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.181.500	225.181.500	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				40.630.000,00	APBD	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	247.699.650
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40.630.000,00	40.630.000,00	100 %	100 %	12 bin	12 bin	KOTA MAKASSAR				40.630.000,00	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44.693.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan Dinas	159.461.500,00	159.461.500,00	100 %	100 %	16 unit	16 unit	KOTA MAKASSAR				159.461.500,00	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan Dinas	6 Unit	175.407.650,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25.090.000,00	25.090.000,00	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	KOTA MAKASSAR				25.090.000,00	APBD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	27.599.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Trigat Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	14.982.215.000	14.982.215.000	70 %	70 %	70 %	70 %	KOTA MAKASSAR				14.982.215.000	APBD	Trigat Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	70 %	16.480.362.800
	Trigat Pemuda Dalam Organisasi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	60,75 %	60,75 %	60,75 %	60,75 %	60,75 %	60,75 %	KOTA MAKASSAR				60,75 %	APBD	Trigat Pemuda Dalam Organisasi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	60,75 %	16.480.362.800

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda wirausaha muda pemuda, dan pemuda yang terakansa	12 keg	100%	100%	12.833.961.000	APBD	14.117.357.100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1000 Orang	100%	100%	3.472.707.000	APBD	3.819.377.700
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1000 Orang	100%	100%	2.477.200.000	APBD	2.724.920.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1000 Orang	100%	100%	2.425.314.000	APBD	2.667.845.400
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	150 org	100%	100%	823.530.000	APBD	905.883.000
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%	100%	1.235.865.000	APBD	1.359.451.500
Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan	400 Orang	100%	100%	3.222.875.000	APBD	3.545.162.500
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diteleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	0	0	0	0	APBD	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Komitmen dengan Dunia	Jumlah organisasi yang diberdayakan	30 organisasi	100%	100%	2.148.187.000	APBD	2.363.005.700
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah pertumbuhan wirausaha muda baru	100 orang	100%	100%	2.148.187.000	APBD	2.363.005.700
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	34,3%	34,3%					
Cakupan Pembinaan Olahraga	39,06%	39,06%					
Peningkatan Prestasi Olahraga	306 atlet berprestasi 25 cabang olahraga Atlet Cabang Olahraga	306 atlet berprestasi 25 cabang olahraga Atlet Cabang Olahraga					
					286.053.576.450	APBD	314.558.934.095

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR	5 cabang olahraga	100%	100%	206.988.067.500	207.548.067.500	APBD	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	228.302.874.250
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR	3 Unit	100%	100%	125.665.000,00	125.665.000,00	APBD	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota	138.331.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perwujudan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Satuan Pendidikan Dasar	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	100%	100%	512.126.000,00	512.126.000,00	APBD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Satuan Pendidikan Dasar	563.338.600,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terautentikasi	KOTA MAKASSAR	4 Unit	100%	100%	206.350.276.500,00	206.910.276.500	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terautentikasi	227.601.304.150
Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejaran yang terlaksana	KOTA MAKASSAR	11 kegiatan	100%	100%	8.513.595.649	25.210.625.649	APBD	Jumlah kejaran yang terlaksana	27.731.688.214
Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	100%	100%	4.344.802.950,00	21.041.832.950,00	APBD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	23.146.016.245,00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejaraan	KOTA MAKASSAR	100 Orang	100%	100%	37.791.392.699,00	3.791.392.699,00	APBD	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejaraan	4.170.531.968,90
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	KOTA MAKASSAR	50 organisasi	100%	100%	38.378.445.000	38.554.345.000	APBD	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	42.409.779.500
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	KOTA MAKASSAR	4 Dokumen	100%	100%	520.100.000	520.100.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	572.110.000
Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR	4 Dokumen	100%	100%	37.500.000.000	37.500.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	41.250.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	KOTA MAKASSAR	5 kegiatan	100%	100%	12.475.725.901	14.740.538.301	APBD	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	16.214.592.131
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi	KOTA MAKASSAR	3 Dokumen	100%	100%	2.282.243.000,00	2.282.243.000,00	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	2.510.467.300,00
Pemberdayaan Perwujudan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	KOTA MAKASSAR	1 Laporan	100%	100%	1.878.552.000,00	2.918.552.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	3.210.407.200

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	KOTA MAKASSAR	31 Unit	31 Unit	100 %	100 %	6.663.833.301,00	6.663.833.301,00	APBD	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	32 Unit	7.330.216.631,10
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	KOTA MAKASSAR	31 Unit	31 Unit	100 %	100 %	2.211.404.000	2.211.404.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Dokumen	2.432.544.400
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	664.506.000,00	664.506.000,00	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	730.956.600,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Pramuka	KOTA MAKASSAR	7151 (610 binaan pramuka)853 gugus depan) %	7151 (610 binaan pramuka)853 gugus depan) %					APBD	Cakupan Pembinaan Pramuka	7151 (610 binaan pramuka)853 gugus depan) %	5.500.000.000
	Jumlah Prestasi Pramuka	KOTA MAKASSAR	70 (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwardir tergiat) Orang	70 (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwardir tergiat) Orang			5.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Jumlah Prestasi Pramuka	70 (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwardir tergiat) Orang	
Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	KOTA MAKASSAR	2 keg	2 keg	100%	100%	5.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	2 keg	5.500.000.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	KOTA MAKASSAR	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	100 %	5.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	5.500.000.000